

SKRIPSI

**ANALISIS PENGUNGKAPAN EMISI DAN KINERJA KEUANGAN
PADA SEKTOR INDUSTRI SENSITIF LINGKUNGAN DI INDONESIA
BERDASARKAN *GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)*
*STANDARDS***

SRI RAHMATIAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENGUNGKAPAN EMISI DAN KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR INDUSTRI SENSITIF LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASARKAN *GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)* *STANDARDS*

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

SRI RAHMATIAH

A031181359



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENGUNGKAPAN EMISI DAN KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR INDUSTRI SENSITIF LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASARKAN *GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)* *STANDARDS*

disusun dan diajukan oleh

SRI RAHMATIAH
A031181359

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 April 2023

Pembimbing I



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA, CSRS, CSRA
NIP: 19740206 200812 2001

Pembimbing II



Afdal, S.E., M.Sc., DEc., Ak.
NIP: 19880901 201504 1001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. ✍️
NIP: 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENGUNGKAPAN EMISI DAN KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR INDUSTRI SENSITIF LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASARKAN *GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)* *STANDARDS*

disusun dan diajukan oleh

SRI RAHMATIAH
A031181359

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **4 Mei 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA, CSRS, CSRA	Ketua	1 
2.	Afdal, S.E., M.Sc., DEc., Ak.	Sekretaris	2 
3.	Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSI	Anggota	3 
4.	Asharin Juwita Purisamy, S.E., MSc.	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. 
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Rahmatiah
NIM : A031181359
Departemen/Program Studi : Akuntansi / Strata satu (S1)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

ANALISIS PENGUNGKAPAN EMISI DAN KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR INDUSTRI SENSITIF LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASARKAN *GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) STANDARDS*

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 03 April 2023

Yang membuat pernyataan,


Sri Rahmatiah

PRAKATA

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah”

Puja dan puji Ilahi Tuhan semesta alam, hanya kepada-Nya tertuang rasa syukur atas segala berkat dan nikmat yang terus tercurahkan kepada kita semua. Dialah pemilik ilmu pengetahuan yang memberikan anugerah sekaligus tanggungjawab kecerdasan serta terangnya penglihatan dalam melihat luasnya cakrawala pengetahuan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga beserta para sahabat yang secara historis telah menyibak tabir kegelapan dan menjadi suri tauladan sepanjang zaman.

Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengungkapan Emisi dan Kinerja Keuangan Pada Sektor Industri Sensitif Lingkungan di Indonesia Berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Rampungnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyak hambatan dan rintangan yang peneliti hadapi, tetapi akhirnya dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dukungan, kontribusi dan doa dari banyak pihak yang diberikan kepada peneliti dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan salam takzim, rasa hormat, penghargaan, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini.

1. Kedua orang tua terkasih, Bapak Muhammad Asri Laongkeng dan Almh. Ibu Hj. Darmawati Lauseng; Kakak, Junaidi Asri; Kakek dan Nenek serta segenap

keluarga yang senantiasa menyertakan kasih, cinta dan semangat dalam setiap langkah peneliti.

2. Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA, CSRS, CSRA dan Bapak Afdal, S.E., M.Sc., DEc., Ak., yang tidak sekedar menjadi dosen pembimbing skripsi melainkan juga menjadi rekan diskusi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memotivasi peneliti dengan penuh kebijaksanaan dan ketulusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSI selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama proses perkuliahan dari awal hingga masa akhir studi peneliti.
4. Bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSI dan Ibu Asharin Juwita Purisamya, S.E., MSc., selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi serta saran bagi peneliti dari ujian proposal hingga ujian skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat, serta segenap pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.
6. Sobat TRANSMIGRAN — Nita dan Anggi, yang telah menemani dan menyemangati satu sama lain dalam segala hal, persoalan kuliah, persoalan keluarga maupun persoalan lainnya.
7. Saudari sekampung halaman — Ipah, Izzah, Winda, Dilla, Rahima yang senantiasa menekan dan memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan studi dan pulang ke kampung.
8. Saudara-saudari pejuang wisuda— Opeth, Dodo, Adist, Yasin, Ikhwal, yang telah membersamai peneliti selama hari-hari perkuliahan dan membantu dalam berbagai hal khususnya mengenai skripsi.

9. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi Unhas, karena telah menjadi wadah, ruang pembelajaran, berproses dan memberikan pengalaman yang luar biasa.
10. Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEB-UH yang telah menjadi wadah kebersamaan dalam berproses, menjadi wadah memperoleh pengalaman yang sangat mengesankan.
11. Teman-teman KKN 106 Sidrap 1 — atas bantuan, diskusi, pengalaman dan kerjasamanya selama proses KKN berlangsung.
12. Teman-teman Eterious18 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang senantiasa saling membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada peneliti, khususnya Sandy, Opik, Ipeh.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi, serta memberikan dukungan dan doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penelitian yang lebih lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Makassar,03 April 2023

Sri Rahmatiah

ABSTRAK

ANALISIS PENGUNGKAPAN EMISI DAN KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR INDUSTRI SENSITIF LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASARKAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) STANDARDS

ANALYSIS OF EMISSION DISCLOSURES AND FINANCIAL PERFORMANCE IN ENVIRONMENTALLY SENSITIVE INDUSTRIAL SECTORS IN INDONESIA BASED ON THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) STANDARDS

Sri Rahmatiah
Nadhirah Nagu
Afdal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan emisi dan kinerja keuangan pada sektor industri sensitif lingkungan di Indonesia berdasarkan *GRI Standard* dalam upaya mengurangi dan mengatasi dampak dari peningkatan emisi GRK serta komitmen keberlanjutan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan ketenagalistrikan Indonesia tahun 2016-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan *content analysis* dan bantuan program *software* Atlas.ti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan emisi GRK pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan setiap perusahaan memiliki persentase pengungkapan yang berbeda secara signifikan. Rata-rata perusahaan hanya mengungkapkan pendekatan manajemen secara umum dan lebih spesifik melakukan pengungkapan emisi GRK pada laporan keberlanjutannya. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya pengungkapan tidak selalu mempengaruhi besarnya *Return on Assets (ROA)* perusahaan artinya, *ROA* tidak selalu bergerak seiring dengan pengungkapan emisi GRK.

Kata kunci: Pengungkapan, emisi GRK, industri sensitif lingkungan, *GRI Standards*, *Return on Asset (ROA)*

This study aims to analyze emission disclosure and financial performance in environmentally sensitive industrial sectors in Indonesia based on GRI Standard in an effort to reduce and overcome the impact of increasing GHG emissions and sustainability commitments. This research was conducted on coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and Indonesian electricity companies in 2016-2021. The research method used is a qualitative method using content analysis and the help of the Atlas.ti software program. The results of this study show that GHG emission disclosures in each company's annual report and sustainability report have a significantly different percentage of disclosure. On average, companies only disclose the general management approach and more specifically disclose GHG emissions in their sustainability reports. In addition, the results also show that high disclosure does not always affect the amount of the company's Return on Assets (ROA), meaning that ROA does not always move in tandem with the disclosure of GHG emissions.

Keywords: *Disclosure, GHG emissions, environmentally sensitive industries, GRI Standards, Return on Asset (ROA)*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori <i>Stakeholder</i> (<i>Stakeholder Theory</i>).....	13
2.2 Teori Legitimasi (<i>Legitimation Theory</i>).....	15
2.3 Teori Regulasi (<i>Regulation Theory</i>).....	17
2.4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	18
2.5 Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	19
2.5.1 Pengertian Pengungkapan.....	19
2.5.2 Pihak yang Dituju	20
2.5.3 Luas Pengungkapan	21
2.5.4 Fungsi dan Tujuan Pengungkapan.....	21
2.5.5 Sifat Pengungkapan.....	21
2.5.6 Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan ..	21
2.6 Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>).....	22
2.7 Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>).....	24
2.8 <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI).....	25
2.9 <i>Global Reporting Initiative Standards</i>	27
2.10 Kinerja Keuangan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34

3.4	Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.2	Hasil Penelitian.....	49
4.2.1	Pengungkapan Emisi Pada Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan Perusahaan Berdasarkan <i>GRI Standards</i>	50
4.2.2	Pengungkapan Emisi Perusahaan Berdasarkan <i>GRI Standards</i>	52
4.2.3	Perbandingan Kualitas Pengungkapan Emisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan (<i>Return on Assets</i>).....	70
4.2.4	Pengungkapan Emisi GRK Perusahaan dari Sudut Pandang Teori <i>Stakeholder</i>	73
4.2.5	Pengungkapan Emisi GRK Perusahaan dari Sudut Pandang Teori Legitimasi	74
4.2.6	Pengungkapan Emisi GRK Perusahaan dari Sudut Pandang Teori Regulasi.....	75
BAB V PENUTUP.....		77
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Keterbatasan.....	78
5.3	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Emisi Karbon (CO ₂) dari Pembakaran Energi dan Aktivitas Industri di Skala Global (2001-2021)	2
1.2 Emisi Metana dari Tambang Batubara Berdasarkan Negara (2022)	4
4.1 Jumlah Produksi Batubara PT Bumi Resouerces Tbk.....	40
4.2 Jumlah Produksi Batubara PT Indika Energy Tbk.....	41
4.3 Jumlah Produksi Batubara PT Indo Tambangraya Megah Tbk.....	42
4.4 Jumlah Produksi Batubara PT Bukit Asam Tbk.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1	Daftar Perusahaan Yang Menjadi Objek Penelitian (Sampel)39
4.2	Rekapitulasi Pengungkapan Emisi GRK berdasarkan <i>GRI Standards</i> Pada Laporan Keberlanjutan Periode Tahun 2016-2021.....50
4.3	Rekapitulasi Pengungkapan Emisi GRK berdasarkan <i>GRI Standards</i> Pada Laporan Tahunan Periode Tahun 2016-202150
4.4	Pengungkapan Emisi GRK PT Bumi Resources Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode Tahun 2016-202152
4.5	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT Bumi Resources Tbk Berdasarkan Indikator <i>GRI Standards</i>53
4.6	Pengungkapan Emisi GRK PT PT Indika Energy Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode Tahun 2016-202153
4.7	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT Indika Energy Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>54
4.8	Pengungkapan Emisi GRK PT PT Indo Tambangraya Megah Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode Tahun 2016-202155
4.9	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT PT Indo Tambangraya Megah Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>56
4.10	Pengungkapan Emisi GRK PT PT Bukit Asam Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode Tahun 2016-202156
4.11	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT PT Bukit Asam Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>57
4.12	Pengungkapan Emisi GRK PT PLN (Persero) Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode Tahun 2016-202158
4.13	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT PLN (Persero) Berdasarkan <i>GRI Standards</i>59
4.14	Pengungkapan Emisi GRK PT Adaro Energy Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode Tahun 2016-202160
4.15	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT Adaro Energy Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>61

4.16	Pengungkapan Emisi GRK PT Baramulti Suksessarana Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode 2016-2021	62
4.17	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT Baramulti Suksessarana Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>	62
4.18	Pengungkapan Emisi GRK PT Darma Henwa Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode 2016-2021	63
4.19	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT Darma Henwa Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>	63
4.20	Pengungkapan Emisi GRK PT Delta Dunia Makmur Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode 2016-2021	64
4.21	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK Dunia Makmur Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>	64
4.22	Pengungkapan Emisi GRK PT Dian Swastika Sentosa Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode 2016-2021	65
4.23	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT Dian Swastika Sentosa Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>	66
4.24	Pengungkapan Emisi GRK PT Harum Energy Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode 2016-2021	66
4.25	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT Harum Energy Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>	67
4.26	Pengungkapan Emisi GRK PT Resources Alam Indonesia Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode 2016-2021	67
4.27	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT Resources Alam Indonesia Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>	68
4.28	Pengungkapan Emisi GRK PT Mitrabara Adiperdana Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i> Periode 2016-2021	68
4.29	Preferensi Pengungkapan Emisi GRK PT Mitrabara Adiperdana Tbk Berdasarkan <i>GRI Standards</i>	69
4.30	Persentase Pengungkapan Emisi GRK dan <i>Return on Assets (ROA)</i> Perusahaan	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti	81
Lampiran 2 Daftar Perusahaan Tambang Bartubara Yang Terdaftar di BEI dan Perusahaan Ketenaga listritan	83
Lampiran 3 Tabulasi Data Hasil Penelitian.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

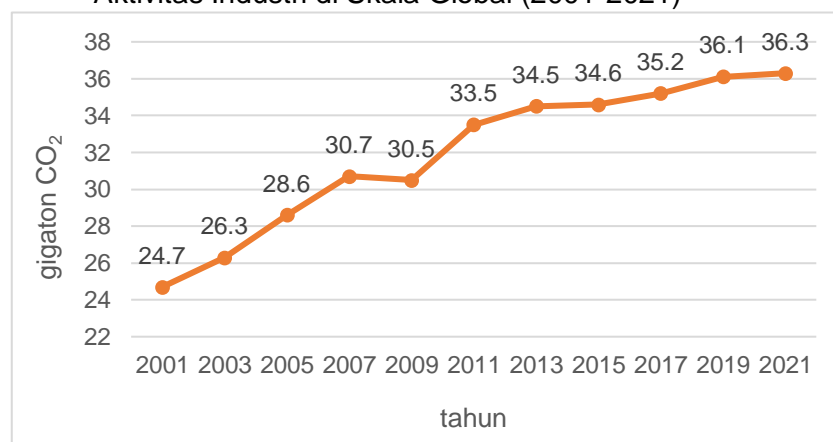
Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi global telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan perkembangan ini pula telah menyumbang perubahan ekologi secara global. Suhu bumi meningkat hari demi hari, salah satu faktor terbesar penyebab peningkatan suhu ini adalah peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK). Adanya peningkatan konsentrasi GRK disebabkan oleh aktivitas manusia terutama para pelaku ekonomi atau industri yang dalam operasinya melibatkan penggunaan sumber daya secara masif seperti energi yang bersumber dari fosil. Peningkatan emisi GRK memberi dampak pada lingkungan yakni meningkatnya suhu bumi (*Global Warming*) disertai perubahan iklim global (Magdoff & Foster, 2018 dan Handayani, 2019).

Peningkatan suhu permukaan global, menurut laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, adalah 1,09 [0,95 hingga 1,20] °C pada 2011-2020 di atas tingkat pra-industri dan selama 100 tahun terakhir mengalami peningkatan suhu rata-rata secara global. Selain itu, terdapat perkiraan *Working Group I* bahwa ada setidaknya lebih besar dari 50% kemungkinan pemanasan global akan mencapai atau melebihi 1,5° dalam waktu dekat (IPCC, 2022). Berdasarkan data pada *Climate Watch (2022)* dan *World Resource Institute (WRI, 2022)*, Indonesia merupakan negara penghasil emisi GRK terbesar kedelapan pada tahun 2019 dengan jumlah emisi GRK sebesar 1002.4 MtCO₂e atau 2.08% dari jumlah emisi GRK global. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi besar dalam peningkatan suhu global.

Institute for Essential Service Reform (IESR) menyatakan bahwa Indonesia sepanjang 2019, sektor energi masih menjadi sumber penyumbang GRK terbesar (45.7% selain sektor *forest and other land uses* atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan). Sektor ketenagalistrikan atau energi Indonesia didominasi oleh bahan bakar fosil sebesar 82% dengan batubara menyumbang bagian tertinggi yaitu 63% (IESR, 2021). Selain itu, produksi batubara Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia yang mencapai 614 juta ton pada tahun 2021 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022).

Produksi tenaga listrik atau energi dengan pengelolaan hingga pembakaran batubara menjadi sumber terbesar produksi GRK berupa CO₂. Pada tahun 2021 tercatat emisi karbon global mencapai 36,3 gigaton CO₂ dan angka tersebut merupakan rekor emisi tertinggi sepanjang sejarah. Untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2050, *International Energy Agency (IEA)* menggarisbawahi bahwa upaya harus dilakukan untuk menurunkan emisi CO₂ di seluruh dunia (IEA, 2021; Pusparisa, 2021). Emisi CO₂ skala global dari proses industri dan pembakaran bahan bakar fosil antara tahun 2001 hingga tahun 2021 digambarkan dalam bentuk grafik disajikan pada Gambar 1, sebagai berikut.

Gambar 1.1 Emisi Karbon (CO₂) dari Pembakaran Energi dan Aktivitas Industri di Skala Global (2001-2021)



Sumber: Databoks (2022)

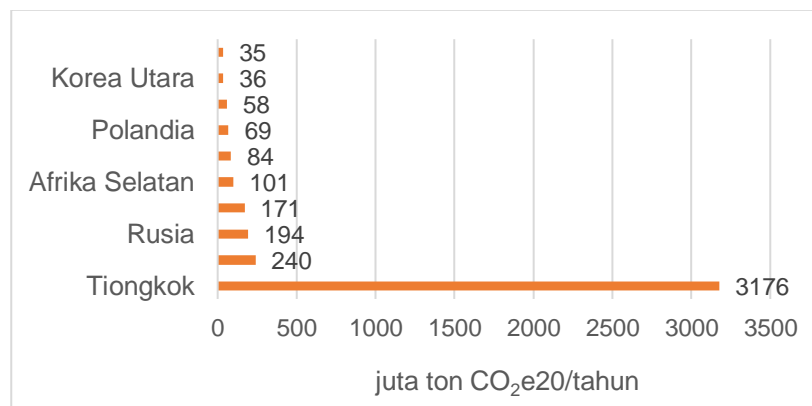
Setiap jenis industri memiliki tingkat dampak yang berbeda-beda. Industri didasarkan pada sektor maupun aktivitasnya dikategorikan menjadi dua. Dua kategori tersebut adalah industri sensitif dan non-sensitif terhadap lingkungan. Industri sensitif merupakan perusahaan yang beroperasi pada sektor energi, pertambangan, mineral dan utilitas, kategori ini merupakan industri yang menghasilkan emisi GRK dengan jumlah besar sehingga berdampak relatif signifikan terhadap lingkungan. Sebaliknya, tipe industri non-sensitif dinilai menghasilkan emisi dengan volume cenderung lebih kecil apabila dibandingkan dengan tipe industri sebelumnya (Cho & Patten, 2012; Nagu, 2020; *GICS*, 2018).

Perusahaan sektor pertambangan merupakan industri ekstraktif yang bergerak dan sangat mempengaruhi bidang lingkungan. Dalam operasinya, perusahaan tambang banyak menuai sorotan tentang proses operasinya dan karena dalam operasinya menggunakan sumber daya alam yang sulit bahkan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, hal tersebut cukup bertentangan dengan konsep berkelanjutan yang juga mengedepankan kebutuhan generasi mendatang. Perusahaan pertambangan, khususnya perusahaan pertambangan batubara, diklasifikasikan sebagai perusahaan yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya gas limbah yang dihasilkan berupa emisi GRK metana. Selain CO₂, CH₄ juga merupakan salah satu emisi GRK yang berkontribusi terhadap krisis iklim. Metana bahkan tercatat bahwa 25 kali lebih efektif menahan panas di atmosfer dibandingkan CO₂.

Berdasarkan data *Global Energy Monitor* (2022), tambang batubara di Indonesia menghasilkan emisi metana sebanyak 58 juta ton CO₂e₂₀ setiap tahun, data tersebut ditunjukkan dalam Gambar 2. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara penghasil emisi terbesar kedelapan di dunia meskipun produksi batubara Indonesia adalah yang terbesar ketiga di skala global. Besaran emisi

metana Indonesia lebih rendah dari kapasitas produksi batubara karena kebanyakan aktivitas pertambangannya berada di permukaan, bukan di bawah tanah. CH₄ akan tercatat semakin besar seiring dengan semakin dalamnya lokasi pertambangan batubara. CH₄ yang dihasilkan dari aktivitas tambang batubara diprediksi akan terus menjadi masalah ke depannya meski terdapat usaha penghentian tambang batubara. Hal tersebut disebabkan tambang yang sudah tidak beroperasi pun akan tetap masih menghasilkan metana.

Gambar 1.2 Emisi Metana dari Tambang Batubara Berdasarkan Negara (2022)



Sumber: Databoks (2022)

Adapun upaya global dalam mengatasi perubahan iklim serta penanganan masalah emisi GRK adalah diadakannya agenda tahunan sebagai forum tingkat tinggi rutin oleh 197 negara salah satunya Indonesia untuk membicarakan perubahan iklim dan bagaimana negara-negara di dunia berencana untuk mengatasinya. Agenda tersebut adalah Konvensi Kerangka Kerjasama Persatuan Bangsa-Bangsa terkait Perubahan Iklim atau *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang menciptakan sebuah amandemen internasional yang dikenal dengan *Protokol Kyoto* dan *Paris Agreement*.

Sementara itu, komitmen Indonesia dalam upaya mengurangi emisi GRK sejalan dengan konstitusi Indonesia (UUD 1945, Pasal 28 H) yang menekankan kewajiban negara untuk menjamin kehidupan yang layak dan lingkungan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia. Indonesia dalam upaya mengatasi perubahan iklim serta penanganan masalah emisi GRK adalah membuat dan mengesahkan kebijakan dan aturan. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan dua kebijakan dan peraturan yang dimaksud. Selain itu, perseroan yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan pasal 66 ayat 2 butir c, mengatur secara tegas agar perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.

Selain itu, perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih baik lebih berpotensi mengungkapkan informasi berkaitan dengan dampak operasinya. Hal ini disebabkan pengungkapan membutuhkan sumber daya perusahaan lebih besar. Sementara itu semakin besar kinerja perusahaan semakin mampu berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan seperti mengganti mesin-mesin produksi yang lebih ramah lingkungan, ikut dalam kegiatan penanaman pohon, serta berusaha mengurangi emisi. Sehingga walaupun pengungkapan yang dilakukan masih bersifat sukarela tetapi perusahaan dengan kinerja lebih baik lebih mampu melakukannya (Irwhantoko & Basuki, 2016). Seperti yang telah dikemukakan oleh Horváthová (2010) bahwa berdasarkan pada penelitian meta

analisis dari 64 hasil penelitian yang dimulai dari tahun 1978 hingga 2008 menunjukkan pengaruh antara kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi positif 55%, negatif 15%, dan sisanya 30% tidak memiliki pengaruh.

Kinerja perusahaan juga mempengaruhi kecepatan respon perusahaan pada tekanan yang ditimbulkan oleh komunitas masyarakat. Respon perusahaan pada tekanan masyarakat ditunjukkan dengan memberikan sinyal melalui pengungkapan. Sehingga semakin tinggi kinerja perusahaan semakin cepat mengatasi tekanan yang timbul dengan melakukan pengungkapan lingkungan lebih cepat (Jannah dan Muid, 2014). Kinerja perusahaan selain mampu mempercepat respon tekanan juga berfungsi memperluas pengungkapan. Mengingat kinerja perusahaan berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki sehingga semakin tinggi kinerja semakin detil area pengungkapannya (Roberts, 1992).

Pengungkapan emisi GRK menjadi sangat penting karena adanya kekhawatiran akan peningkatan emisi GRK dan sebagai bentuk transparansi kepada para pemangku kepentingan tentang upaya perusahaan dalam mengatasi dampak dari adanya peningkatan suhu bumi serta perubahan iklim (*Carbon Disclosure Project*, 2009). Pada pasal 4 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengajak pelaku usaha untuk melakukan perencanaan dan upaya pelaksanaan penurunan emisi GRK. Upaya untuk mengurangi emisi GRK yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diketahui dengan pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*). Informasi mengenai emisi GRK umumnya disajikan dalam laporan tahunan (*annual report*) dan/atau lebih khusus dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Pengungkapan (*disclosure*) diartikan tidak menutupi, tidak menyembunyikan, menampilkan sesuatu dan menguraikan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2022), dalam upaya penguatan dan keterbukaan praktik pengungkapan keberlanjutan menyatakan bahwa akan menyusun standar pengungkapan keberlanjutan yang diselaraskan dengan standar internasional yang diterbitkan *International Sustainability Standards Board* (ISSB). Selain itu, mulai tahun 2021, Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib membuat Laporan Keberlanjutan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga menekankan penyampaian laporan keberlanjutan dalam surat edarannya, SEOJK Nomor 16/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.

Di Indonesia, praktik pengungkapan dengan laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) sehingga masih terdapat perusahaan yang belum melakukan pengungkapan (Susadi & Kholmi, 2021; Puspita & Jasman, 2022). Namun, kecenderungan jumlah perusahaan terdaftar (*listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI)) yang melakukan pelaporan keberlanjutan mengalami peningkatan. Tercatat per 31 Desember 2021, terdapat 154 perusahaan tercatat atau sekitar 20% dari jumlah perusahaan *listing* saham yang menerbitkan dan melaporkan laporan keberlanjutan 2020 melalui sistem *SPE-IDXNet*. Peningkatan tersebut sebesar 285% dari 2019 yang hanya terdapat 54 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan¹. Akan tetapi, jumlah tersebut masih jauh dibawah jumlah perusahaan yang tercatat pada BEI, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.

¹ <https://majalahcsr.id/direktur-bei-pelaporan-keberlanjutan-meningkat-seiring-naiknya-investor-di-Indonesia/> , diakses 12 Februari 2023

Pentingnya pengungkapan laporan keberlanjutan dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kuantitas dan kualitas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas atau keadaan yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan di Indonesia. Adapun beberapa fenomena yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan dan perusahaan tambang batubara adalah beberapa perusahaan tambang yang tergolong sebagai produsen batubara terbesar di Indonesia yang kemudian dalam operasinya dapat memproduksi emisi dengan jumlah besar pula, masih menyamakan atau menggabungkan laporan keberlanjutan dengan laporan tahunan, bahkan terdapat perusahaan yang belum pernah menerbitkan laporan keberlanjutan walaupun memiliki sumber daya yang memadai untuk melaporkannya. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki transparansi dan sikap tanggung jawab, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi *stakeholdernya*.

Setiap laporan keberlanjutan memiliki esensi yang berbeda-beda tergantung *principle basis* dalam perusahaan. Laporan keberlanjutan disebutkan bukan suatu *nice to have* atau sekedar punya untuk dilaporkan agar tidak mendapatkan ancaman atau teguran oleh *stakeholder*. Terdapat temuan yang dilakukan oleh Direktur *Tri sakti Sustainability Center* bahwa kekeliruan dalam penulisan laporan adalah karena demikian banyaknya indikator, hal tersebut biasanya dilakukan agar laporan yang ditulis terkesan tebal dan lengkap. Selain itu, tidak ada kesinambungan antara awal laporan dan akhir laporan, hanya sekedar agar indikatornya terpenuhi, dengan kata lain tidak terintegrasi dan tidak komprehensif².

² <https://majalahcsr.id/masih-banyak-perusahaan-yang-salah-kaprah-soal-sustainability-report-bagian-2/>, diakses 12 Februari 2023

Dalam penyusunan laporan keberlanjutan, perusahaan harus menerapkan *principle basis*, yaitu berdasarkan jenis usaha, proses bisnis, risiko bisnis, sistem manajemen, inisiatif, komitmen (perusahaan), agar laporan yang disampaikan punya manfaat, terdapat efisiensi, *awareness*, yang diharapkan perusahaan mempunyai bisnis yang sehat dan kuat, dan di saat bersamaan mampu mendukung keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitar termasuk konteks sosialnya adalah karyawan di dalam perusahaan itu sendiri. Di samping itu, pengungkapan laporan tahunan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain berbeda. Perbedaan pengungkapan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Yularto & Chariri (2003) menyatakan aspek laporan keuangan dilihat dari karakteristik perusahaan ditentukan berdasarkan tiga pendekatan yaitu karakteristik yang berkaitan dengan struktur, kinerja (*performance*), dan pasar (*market*).

Penelitian mengenai laporan keberlanjutan mulai berkembang yang menandakan fenomena pelaporan keberlanjutan mulai banyak dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan emisi karbon masih merupakan isu global yang baru sehingga belum banyak yang melakukan penelitian tentang emisi karbon. Penelitian mengenai pengungkapan emisi karbon lebih banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat dan Australia. Seiring dengan meningkatnya perhatian dunia mengenai perubahan iklim, dimana terancamnya kegiatan bisnis perusahaan sebagai dampaknya telah mendorong beberapa penelitian untuk dilakukan. Dimana dampak yang sangat nyata yaitu biaya pengurangan emisi karbon yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi GRK, terkait variable tipe industri yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi, artinya semakin sensitif suatu

perusahaan akan lingkungan dan produksi emisinya maka semakin baik pula pengungkapan dan pelaporannya (Choi, 2013; Krishnamurti & Velayutham, 2018; Ramadhani & Venusita, 2020; dan Dewi & Kurniawan, 2020). Penelitian Choi (2013) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan emisi GRK akan lebih besar di perusahaan pada industri yang intensif emisi GRK. Kualitas pengungkapan emisi GRK telah dipengaruhi secara positif oleh jenis industri. Penelitian yang dilakukan oleh Krishnamurti & Velayutham (2018) menggambarkan tipe industri sensitif secara langsung memiliki pengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* karena emisi GRK yang dihasilkan perusahaan dalam kategori industri intensif akan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan industri non-intensif, menurut penelitian Ramadhani & Venusita (2020), oleh karena itu semakin intens sebuah perusahaan menghasilkan emisi GRK, semakin tinggi kualitas pengungkapan emisi. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Dewi & Kurniawan (2020).

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian tersebut menganalisis pengungkapan emisi berdasarkan tipe industri, sedangkan perbedaannya adalah basis pengungkapan yang digunakan. Penelitian sebelumnya menganalisis pengungkapan emisi GRK berbasis pada *Carbon Disclosure Project (CDP)*, sedangkan penelitian ini menggunakan indikator *GRI Standard* sebagai basis pengungkapan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengungkapan emisi pada sektor industri sensitif lingkungan di Indonesia berdasarkan *GRI Standard* dalam upaya mengurangi dan mengatasi dampak dari peningkatan emisi GRK serta komitmen keberlanjutan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengungkapan emisi dan hubungannya dengan kinerja keuangan pada sektor industri sensitif lingkungan di Indonesia berdasarkan *GRI Standard* dalam upaya mengurangi dan mengatasi dampak dari peningkatan emisi GRK serta komitmen keberlanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan referensi serta memberikan gambaran mengenai relevansi teori dengan pengungkapan emisi dan hubungannya dengan kinerja keuangan pada sektor industri sensitif lingkungan di Indonesia berdasarkan *GRI Standard*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu dalam bidang akuntansi, khususnya sub-bidang akuntansi sosial dan lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan pertimbangan, referensi perbandingan yang memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pengungkapan emisi dan hubungannya dengan kinerja keuangan pada sektor industri sensitif lingkungan di Indonesia berdasarkan *GRI Standard*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan kontribusi pada para pemangku kepentingan sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mendorong peningkatan pengungkapan emisi serta membuat dan memutuskan kebijakan guna menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pertama dari skripsi, menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisikan landasan teori yang berkaitan dengan topik yang diangkat sebagai bahan penjas, definisi konsep dasar atau aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian, serta teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga memuat pokok-pokok yang menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang merupakan penelitian kualitatif, paling tidak bab tiga mencakup penjelasan mengenai rancangan penelitian, jenis dan informasi mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, memuat uraian data dan temuan serta hasil interpretasi yang diperoleh dengan metode penelitian yang telah diuraikan dalam Bab III.

BAB V PENUTUP

Bab penutup atau bab terakhir dari skripsi memuat temuan pokok atau kesimpulan berupa makna dari temuan, keterbatasan penelitian serta saran atau rekomendasi yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholdernya*. Sejak awal 1970-an, telah dikenal pengetahuan tentang konsep teori *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang dipahami sebagai kumpulan kebijakan dan inisiatif yang terkait langsung dengan pemangku kepentingan, nilai-nilai, kepuasan persyaratan hukum, penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta komitmen bisnis untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Bahri & Cahyani, 2016). Secara konsep, pemangku kepentingan suatu organisasi adalah individu, kelompok atau organisasi lain yang dipengaruhi oleh, atau dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya. Beberapa kategori pemangku kepentingan untuk bisnis di antaranya para karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, masyarakat sekitar, pemerintah, pesaing, kelompok penekan dan pihak-pihak lainnya (Horison, 2005).

Teori *stakeholder* menggarisbawahi bahwa pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penciptaan nilai secara tepat kepada perusahaan atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keberadaan dan tindakannya, maka itulah pemangku kepentingan. Teori ini pada dasarnya adalah teori mengenai bagaimana bisnis bekerja dengan sebaik-baiknya dan bagaimana bisnis bisa berjalan sesuai nilai yang ingin dicapai (Freeman *et al.*, 2010). Pada teori *stakeholder*, perusahaan akan melihat bahwa nilai serta

hubungan baik dengan para pemangku kepentingan merupakan bagian penting dan krusial dari kesuksesan jangka panjang perusahaan, yang mana kesuksesan tersebut tidak hanya didasarkan aspek finansial atau keuangan saja (Freeman *et al.*, 2010 & Hapsari, 2021).

Menurut Deegan (2014), teori *stakeholder* memberikan gambaran/kesimpulan yang lebih jelas dengan merujuk pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (kelompok pemangku kepentingan). Teori *stakeholder* memiliki dasar bahwa kelompok pemangku kepentingan yang berbeda tentunya akan memiliki pandangan yang berbeda pula mengenai bagaimana sebuah perusahaan harus menjalankan operasinya dan akan terdapat berbagai kontrak sosial yang dinegosiasikan dengan berbagai jenis pemangku kepentingan yang ada. Pemangku kepentingan berhak dan memiliki kewenangan untuk mempengaruhi manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi sumber daya sehingga dapat mempertahankan kesuksesan perusahaan (Husna, 2020).

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari lingkungannya sehingga perusahaan diharapkan dapat melakukan aktivitas yang dianggap berpengaruh positif dan memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan serta melaporkan aktivitas-aktivitasnya. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya mampu menjaga citra dan reputasinya dengan memperhatikan faktor lingkungan sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kepedulian perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik akan memperoleh citra yang baik pula di mata para pemangku kepentingan. Citra perusahaan yang baik diharapkan dapat memberikan para pemangku kepentingan sebuah *good news* atau sinyal pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan bagi perusahaan (Meiyana & Aisyah, 2019).

Kasus perusahaan yang kurang mempedulikan permasalahan dan kelestarian lingkungan masih sering kali muncul meski telah terdapat regulasi serta pengawasan oleh pemangku kepentingan. Sebelum dibuang, pengelolaan emisi perusahaan yang tidak tepat mengakibatkan polusi dan masalah lingkungan yang merugikan makhluk hidup, menarik perhatian dari *stakeholder*, dan mendorong timbulnya kritik. Perusahaan terancam dengan konsekuensi yang berat jika tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan kritik ini berpotensi mengganggu stabilisasi kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan dan meningkatkan kinerja lingkungannya untuk menjaga kredibilitas dengan pemangku kepentingan terkait (Hapsari, 2021).

2.2 Teori Legitimasi (*Legitimation Theory*)

Pengungkapan laporan sosial dan lingkungan perusahaan, seperti pengungkapan emisi GRK, didasari oleh teori legitimasi. Menurut teori legitimasi, organisasi atau dalam hal ini perusahaan akan senantiasa menunjukkan bahwa keberadaannya sah dalam masyarakat dimana organisasi tersebut beroperasi.

Dowling & Pfeffer (1975) dan Deegan (2014) menyatakan bahwa karena organisasi adalah bagian dari sistem sosial masyarakat, maka perusahaan akan berusaha untuk memastikan bahwa nilai-nilai sosial yang ada dalam segala aktivitasnya sejalan dengan standar sosial yang ada dalam sistem masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut bukan sesuatu yang tetap melainkan bersifat dinamis yang akan berubah dari waktu ke waktu, sehingga mengharuskan organisasi untuk tanggap terhadap lingkungan etis atau moral dimana mereka beroperasi. Legitimasi yang diinginkan oleh perusahaan dari masyarakat adalah bahwa aktivitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku hingga perusahaan dapat terus eksis dan berjalan (*gain concern*) di

tengah-tengah masyarakat karena terdapat hubungan timbal balik antara dua entitas, yaitu perusahaan dan lingkungan masyarakat (Deegan & Unerman, 2011).

Legitimasi perusahaan dapat terancam apabila masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak menjalankan operasinya sesuai dengan norma-norma sosial yang diharapkan masyarakat. Ancaman akan terjadi jika perusahaan telah terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis, melanggar standar masyarakat, merusak lingkungan, memiliki praktik yang tidak adil, terlibat dalam skandal akuntansi, dan lainnya.

Landasan dari teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dan para *stakeholder* selama perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber daya yang ada. Hal tersebutlah yang memotivasi perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari para *stakeholder*, yang salah satunya adalah pengungkapan informasi sebagai tanggung jawab dan akuntabilitas secara transparan. Kepercayaan akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan yang akan menciptakan kredibilitas, jika celah kredibilitas tidak ditutup dengan upaya penyelarasan nilai-nilai bisnis dengan nilai-nilai masyarakat, maka pada saat itulah perusahaan akan kehilangan legitimasinya. Dengan demikian, hal tersebut dapat merusak citra atau reputasi perusahaan hingga bisa berakibat pada kurangnya kontrol atas hasil produksi (Pratama, 2021).

Kinerja lingkungan sangat erat kaitannya dengan teori legitimasi, hal tersebut disebabkan karena dilakukannya pengungkapan informasi mengenai kinerja lingkungan akan menambah kepercayaan masyarakat pada perusahaan. Oleh karenanya, hal-hal mengenai aspek lingkungan harus diungkapkan baik melalui laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Dengan begitu, hal tersebut akan meminimalisir kesenjangan hubungan antara perusahaan dengan para

pemangku kepentingannya (Sahputra *et al.*, 2020). Menurut teori legitimasi, perusahaan, terutama yang berskala besar, menghadapi tekanan yang lebih tinggi dari para pemangku kepentingan atas masalah lingkungan di daerah tempat mereka beroperasi, oleh karena itu perusahaan harus menunjukkan lebih banyak kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut akan mendorong perusahaan besar untuk pengungkapan lebih banyak detail tentang upaya pelestarian lingkungannya. Emisi GRK merupakan isu krusial dari adanya aktivitas manusia khususnya aktivitas perusahaan, dengan pengungkapan emisi GRK dengan baik yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, maka bisa menjadi salah satu cara perusahaan untuk membangun citra baik dan melegitimasi operasi perusahaan.

Dengan demikian, maka tujuan dari mode operasi dan output perusahaan harus sesuai dengan norma dan nilai sosial. Dengan kesesuaian tersebut, sistem akuntabilitas menjadi esensial bagi masyarakat untuk operasional perusahaan yang berkelanjutan.

2.3 Teori Regulasi (*Regulation Theory*)

Regulasi adalah alat atau instrumen yang substansial dalam pengembangan pelaporan dan pengungkapan karena regulasi secara efektif akan mendorong perusahaan dalam melakukan pelaporan dan pengungkapan. Regulasi didesain untuk mengontrol atau mengatur perilaku individu, kelompok atau organisasi (Deegan, 2014). Regulasi merupakan segala kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga otoritas independen tertentu, yang memiliki *power* untuk mengatur dan mengontrol perilaku manajemen perusahaan terutama dalam membuat laporan (finansial maupun non-finansial) dan pengungkapannya. Selain itu, regulasi juga ditujukan untuk memantau dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan tertentu (Zheng *et al.* 2014; Nagu, 2020).

Pentingnya regulasi di atas mendorong munculnya dua perspektif dalam teori regulasi. Dua perspektif tersebut mencakup: (1) perspektif yang berbasis pada motivasi; dan (2) perspektif berbasis pada informasi (Deegan, 2014 dan Nagu, 2020). Beberapa teori baru dibawah landasan teori regulasi adalah teori kepentingan umum yang berlandaskan pada motif membela kepentingan publik, regulasi yang dihasilkan harus dapat memberi manfaat sosial kepada masyarakat luas. Sementara teori *capture* berpendapat bahwa regulasi mungkin diperkenalkan dengan tujuan melindungi kepentingan publik sebagaimana didalilkan dalam teori kepentingan umum, namun terdapat organisasi tertentu yang akan memastikan bahwa regulasi yang akan dijalankan dapat menguntungkan organisasinya. Jadi teori ini berlandaskan pada motif kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Kemudian teori *free-market* (anti regulasi) menganggap bahwa peran regulasi pemerintah tidak penting. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi dapat menyediakan informasi baik keuangan ataupun non-keuangan kepada para *stakeholder* secara sukarela tanpa ada intervensi regulasi dari pemerintah. Yang terakhir, teori pro-regulasi menganggap bahwa intervensi regulasi pemerintah sangat penting dalam mengatur kepentingan publik, karenanya regulasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa kewajiban perusahaan dalam pengungkapan telah terlaksana.

2.4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, gas yang dapat menyerap dan mengeluarkan kembali radiasi inframerah dan hadir di atmosfer sebagai akibat dari aktivitas manusia atau kejadian alam dianggap sebagai GRK. Pelepasan gas tersebut membawa dampak bercampurnya zat di lapisan udara bumi, apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan krisis perubahan iklim. Besaran atau volume emisi yang dihasilkan oleh perusahaan

sangat bergantung pada kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan tersebut. Semakin banyak kegiatan yang digunakan maka emisi GRK yang dihasilkan akan semakin besar. GRK ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, hal tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna dan fungsi lahan, dan kebakaran hutan.

Meningkatnya volume GRK mendorong pemerintah dunia, termasuk pemerintah Indonesia, untuk mengeluarkan peraturan agar semua pelaku usaha atau perusahaan melakukan pelaporan mengenai aktivitas emisinya dalam bentuk pengungkapan emisi yang tertuang pada laporan keberlanjutan (Irwhantoko & Basuki, 2016). Pemerintah memusatkan perhatiannya pada perusahaan karena dianggap sebagai produsen emisi GRK terbesar. Jumlah dan dampak emisi GRK diprediksi akan menurun sebagai akibat dari pengungkapan ini.

2.5 Pengungkapan (*Disclosure*)

Pelaporan menandakan organisasi yang bertanggung jawab, dan salah satu upaya yang didedikasikan untuk bersikap terbuka dan jujur dengan para pemangku kepentingan. Melalui pelaporan, sebuah organisasi dapat memahami dan mengelola dengan lebih baik dampak yang ditimbulkan atas aktivitasnya terhadap manusia (sosial) dan planet (lingkungan). Dengan pelaporan, dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko, menangkap peluang baru, dan mengambil keputusan dan tindakan untuk organisasi yang bertanggung jawab dan tepercaya di dunia yang lebih berkelanjutan.

2.5.1 Pengertian Pengungkapan

Menurut Suwardjono (2008) pengungkapan (*disclosure*) adalah tidak menutupi atau menyembunyikan. Secara konseptual, pengungkapan adalah bagian integral dari suatu pelaporan. Secara teknis, pengungkapan merupakan

tahapan akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat laporan.

Selain itu, pengungkapan juga dapat diartikan sebagai sebuah pemenuhan akan prinsip-prinsip legitimasi serta tanggung jawab kepada pemangku kepentingan sebagai sebuah *outcome* dari proses responsif perusahaan. Instrumen penting dalam pengungkapan adalah regulasi terutama standar karena merupakan alat efektif untuk mendorong perusahaan untuk melakukan *disclosure* tanggung jawab sosial. Regulasi akan mendorong bahkan memaksa perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Berdasarkan teori *stakeholder* di atas, pengungkapan dapat menjadi alat evaluasi bagi *stakeholder* dan sebaliknya pengungkapan menjadi alat kendali dalam mengantisipasi tuntutan *stakeholder*. Di samping itu, pengungkapan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan berupa program dan kebijakan perusahaan kepada *stakeholder* dimana perusahaan beroperasi (Wood, 2010; Zheng et al., 2014; Nagu, 2020).

2.5.2 Pihak yang Dituju

Berdasarkan kerangka konseptual, pihak-pihak yang didefinisikan sebagai tujuan pengungkapan laporan keuangan adalah investor dan kreditor. Namun, pada dasarnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan memenuhi kebutuhan akan informasi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Oleh karena itu, pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pengungkapan laporan keuangan yang bersifat kuantitatif, namun juga harus mengungkapkan informasi yang bersifat kualitatif. Dengan beragamnya pihak yang dituju dan model pengambilan keputusan yang kurang dapat teridentifikasi, maka pengungkapan cenderung bersifat luas dan jarang menjadi sempit atau spesifik (Suwardjono, 2008).

2.5.3 Luas Pengungkapan

Luas pengungkapan atau seberapa banyak informasi yang harus diberikan, adalah gagasan luas tentang pengungkapan (Suwardjono, 2008). Berbagai tuntutan dan kepentingan pengguna berdampak pada seberapa banyak informasi yang harus disajikan dalam laporan (Siregar & Bachtiar, 2003).

2.5.4 Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

Tujuan pengungkapan adalah untuk melayani banyak pihak dengan berbagai kepentingan dan untuk mengungkapkan informasi yang dianggap relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan (Suwardono, 2008).

2.5.5 Sifat Pengungkapan

Dua jenis pengungkapan dilakukan oleh perusahaan yaitu pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*mandatory/discretionary disclosure*). Sebuah perusahaan dapat mengungkapkan informasi secara sukarela jika tidak ada aturan akuntansi atau peraturan yang berlaku yang mengamanatkannya. Pengungkapan wajib, di sisi lain, adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan berlaku dan di evaluasi oleh badan pengawas.

2.5.6 Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan

Menurut Belkaoui (2006), salah satu tujuan pengungkapan adalah untuk memberikan informasi kepada kreditor dan investor sehingga mereka dapat mengevaluasi risiko dan memperkirakan hasil investasi. Pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan adalah mengungkapkan atau menyediakan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mewujudkan tujuan berkelanjutan. Di samping itu, pengungkapan laporan tahunan antara satu perusahaan dengan

perusahaan yang lain berbeda. Perbedaan pengungkapan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Yularto & Chariri (2003) menyatakan aspek laporan keuangan dilihat dari karakteristik perusahaan ditentukan berdasarkan tiga pendekatan yaitu karakteristik yang berkaitan dengan struktur, kinerja (*performance*), dan pasar (*market*).

2.6 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Laporan keberlanjutan adalah laporan yang mencakup kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab lingkungan, menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai bentuk laporan yang dibuat oleh emiten, perusahaan publik atau lembaga jasa keuangan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik secara akuntabel.

GRI mendefinisikan pelaporan keberlanjutan sebagai suatu praktik pengukuran, pengungkapan dan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal tentang kinerja organisasi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dalam laporan keberlanjutan yang termuat dalam *GRI* adalah ketepatan (*accuracy*), keseimbangan (*balance*) kejelasan (*clarity*), keterbandingan (*comparability*), kelengkapan (*completeness*), konteks keberlanjutan (*sustainability context*), ketepatan waktu (*timeliness*) dan terverifikasi (*verifiability*) (*GRI*, 2021). Menurut NCSR, pelaporan keberlanjutan memberikan informasi kepada *stakeholder* tentang dampak keberlanjutan dari kegiatan bisnis utama perusahaan dan langkah-langkah strategis yang telah diambil perusahaan untuk mengatasi

dampak tersebut sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi.

Selama beberapa dekade terakhir, pembuatan laporan keberlanjutan telah berubah dalam perspektif dan fokus dari pelaporan non-keuangan untuk menanggapi perubahan tatanan sosial menuju pencapaian *Sustainability Development Goal's*. Penyusunan dan penerbitan laporan keberlanjutan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan sejak tahun 2000, *GRI* melaporkan pada waktu itu, hanya terdapat 44 perusahaan di seluruh dunia yang menerbitkan laporan keberlanjutan (Ioannou & Serafeim, 2017), sementara telah terdapat lebih dari 500 organisasi atau perusahaan dari lebih 70 negara menjadi bagian komunitas *GRI* (GRI, 2022).

Laporan keuangan pada abad ke-19 semata-mata berkaitan dengan prinsip-prinsip moneter. Pada 1970-an, beberapa bisnis juga mulai memasukkan pertambahan sosial ke dalam rekening keuangan mereka. Tujuannya adalah untuk menginformasikan pada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kegiatan, barang, dan jasa, serta pada semua aspek — baik dan buruk — yang berdampak pada masyarakat. Penekanan perusahaan sebelumnya pada masyarakat dan politik mulai beralih ke kualitas hidup ketika kenaikan upah mulai terlihat. Semakin banyak bisnis mulai merilis informasi ini kepada masyarakat umum pada akhir 1970-an. Dua puluh tahun kemudian, pelaporan lingkungan mulai muncul dan menjadi awal mula laporan aktivitas sosial. Efektivitas efek ekologis atau lingkungan seperti emisi, air dan udara, jumlah sampah, dan lain-lain sebagai akibat dari operasi perusahaan adalah penekanan utama dari laporan tersebut. Pada tahun tersebut, banyak perusahaan mulai menerbitkan dan memublikasikan target sosial, aktivitas dan dampak terhadap lingkungan (Dierkes, 1976 dan Hemmer, 1996).

Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an pelaporan berkelanjutan diterbitkan atas reaksi dari banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi, sebagai konsekuensinya perusahaan di anggap sebagai penyebab utama kemerosotan perkembangan kondisi kerja dan pekerja sekaligus perusakan lingkungan. Untuk mempertahankan legitimasi sosial, perusahaan mulai secara sukarela untuk mengungkapkan informasi mengenai kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan sosial dan lingkungan kepada pemangku kepentingan. Mulai sejak itu, semakin banyak perusahaan yang memberikan informasi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam bentuk laporan keberlanjutan.

2.7 Laporan Tahunan (*Annual Report*)

Laporan tahunan adalah suatu laporan resmi mengenai keadaan keuangan emiten dalam jangka waktu satu tahun. Laporan ini harus disampaikan kepada para pemegang saham untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya disahkan sebagai laporan tahunan resmi perusahaan. Laporan tahunan wajib disampaikan oleh emiten yang terdaftar di BEI sebagai pelaporan kegiatan perusahaan selama satu tahun dan nantinya laporan ini akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 mendefinisikan Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu satu tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun tujuan laporan tahunan menurut Jumingan (2011) adalah di antaranya (1) berguna bagi pemakai (*user*) laporan tahunan dalam membuat keputusan investasi, masalah kredit atau keputusan-keputusan lainnya; (2)

menyediakan laporan yang komprehensif mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang, baik kegiatan operasional, keuangan dan informasi-informasi relevan lainnya; (3) menyediakan informasi lain mengenai sumber daya perusahaan serta perubahannya.

2.8 Global Reporting Initiative (GRI)

GRI didirikan di Boston, USA pada tahun 1997. *GRI* dibentuk oleh *the Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)*, *Tellus Institute* dan *United Nations Environment Programme (UNEP)*. Tujuan dibentuknya *GRI* adalah untuk menciptakan mekanisme yang akuntabilitas untuk memastikan setiap perusahaan mengikuti prinsip CERES yaitu membangun lingkungan yang bertanggung jawab (CERES, 2021).

GRI adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk kepentingan publik menuju visi ekonomi global yang berkelanjutan. *GRI* mengembangkan dan menyebarkan pedoman pelaporan keberlanjutan yang berlaku secara global. Pedoman tersebut telah dikembangkan melalui proses *multi-stakeholder* yang menggabungkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda termasuk organisasi bisnis, akuntan, para *shareholder* dan *stockholder*, organisasi pembela hak asasi manusia, penelitian, organisasi pemerintah, organisasi pemerhati lingkungan dan organisasi tenaga kerja/buruh dari seluruh dunia dengan tujuan menciptakan suatu kerangka kerja yang sama untuk pelaporan kinerja perusahaan secara *economic, social, dan environmental*. Dilema akan terjadi ketika perusahaan akan memulai atau melanjutkan proses pelaporannya menggunakan laporan tanggung jawab sosial yang baru, namun dibanding dengan non *GRI*, laporan yang diungkapkan berbasis *GRI Standards* lebih memiliki kerangka pelaporan yang lebih rinci, komprehensif dan merupakan

standar pelaporan tanggung jawab sosial terkemuka yang berlaku secara global atau diterima secara umum (Luthan, 2010; Cohen, 2013; GRI, 2016).

Upaya dalam mewujudkan visi dan misinya, *GRI* telah memelopori pelaporan keberlanjutan sejak akhir 1990-an, mengubah dan mengembangkan dari praktik khusus menjadi praktik yang saat ini dianut oleh sebagian besar organisasi berkembang. *GRI* menyediakan standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan di dunia, yang memungkinkan berbagai bisnis, pemerintah, masyarakat sipil serta pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan berdasarkan informasi yang penting untuk diketahui, maka dari itu terdapat ribuan *reporter GRI* di lebih dari 90 negara. *GRI* secara global telah tersebar dan diadaptasi oleh banyak perusahaan, terhitung dari 250 perusahaan terbesar di dunia, 93% melaporkan kinerja keberlanjutan dan lebih dari 80% di antaranya menggunakan Standar Pelaporan Keberlanjutan *GRI*.

Secara aliansi dan sinergi, *GRI* memiliki kemitraan strategis global dengan berbagai organisasi internasional yang mana beberapa di antaranya adalah, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *the United Nations Environment Programme (UNEP)* dan *the United Nations Global Compact (UNGC)*, dengan kerangka kerja yang bersinergi dengan bimbingan *International Finance Corporation*, *International Organization's ISO 26000*, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Prakarsa Piagam Bumi. Fokus aliansi ini adalah perusahaan dapat mengidentifikasi dampaknya terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan, mengukur dan menetapkan target, mengambil tindakan untuk meminimalkan dampak negatifnya dan meningkatkan dampak positifnya, melaporkan hasilnya dalam laporan keberlanjutan secara jelas dan koheren (*UN*, 2016 dan *FBRH*, 2022).

2.9 *Global Reporting Initiative Standards*

Standar *GRI (GRI Standard)* adalah sebuah kerangka (*framework*) sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan yang dirancang agar terbentuk pemahaman yang sama bagi organisasi dan pemangku kepentingan, sehingga informasi mengenai dampak ekonomi sosial dan lingkungan serta strategi dalam pengendalian dampak tersebut dapat dikomunikasikan, dipahami dan diperbandingkan secara global. Standar pelaporan keberlanjutan yang dikeluarkan *GRI* dinyatakan dalam *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* merupakan sebuah standar panduan *sustainability reporting* yang dapat diterapkan dan diterima secara luas serta dapat menambah reputasi positif perusahaan *GRI* lebih memiliki rerangka pelaporan yang lebih rinci, komprehensif dan merupakan standar pelaporan tanggung jawab sosial terkemuka yang berlaku secara global atau berterima secara umum (WBCSD, 2017). Selain itu, tidak seperti dengan pedoman sebelumnya, *GRI Standards* telah bersifat wajib (*mandatory*) atau memiliki ketetapan hukum yang mengikat bagi organisasi untuk wajib melaksanakannya (Cohen, 2013; Feijoo *et al.*, 2014; Herriott, 2016; GRI, 2016; dan Nagu, 2020).

GRI Standards memungkinkan setiap organisasi, besar atau kecil, swasta atau publik untuk memahami dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dengan cara yang sebanding dan kredibel, sehingga meningkatkan transparansi atas kontribusi terhadap pembangun berkelanjutan. Selain untuk perusahaan, standar ini sangat relevan bagi banyak pemangku kepentingan sebagai pembaca laporan keberlanjutan, termasuk investor, pembuat kebijakan, pasar modal dan masyarakat sipil.

GRI Standards akan terus mengalami pembaharuan demi mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan dan penyesuaian dengan tren

berkelanjutan. Agar *GRI Standards* tetap relevan dan mutakhir, *the Global Sustainability Standards Board* (GSSB) menetapkan program kerja baru setiap tiga tahun. Program kerja GSSB mencakup proyek untuk meninjau *GRI Standards* yang ada serta untuk mengembangkan standar baru. *GRI* telah mengeluarkan beberapa pedoman pelaporan tanggung jawab sosial yakni G1 tahun 2000, G2 tahun 2002, G3 tahun 2006, dan G3.1 tahun 2011. Sebelum sempat berlaku, Standar G3 langsung diperbarui menjadi G4. Pada tanggal 22 Mei 2013 bertempat di Amsterdam, Belanda, *GRI* merilis *G4 Guidelines* yang efektif hingga tanggal 30 Juni 2018. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016, *GRI* menerbitkan *GRI Standards* yang mulai efektif pada tanggal 1 Juli 2018 hingga *GRI Standard 2020* dan *GRI Standard 2021* yang terbaru untuk memperbaharui versi sebelumnya yang dirilis pada Oktober 2021.

Pembaharuan *GRI Standards* memiliki tiga hal yang dikedepankan yaitu, merevisi standar universal sebelumnya, menampilkan sektor standar baru, dan standar topik yang lebih adaptif. Namun, penerapan *GRI Standard 2021* baru akan mulai berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2023³. *GRI Standard* terbaru dirancang sebagai sistem dan perangkat modular yang mudah digunakan dan memberikan gambaran inklusif tentang topik material organisasi, dampak terkaitnya dan cara pengelolaannya. Standar ini terdiri dari tiga seri meliputi, Standar Universal, Standar Sektor dan Standar Topik. Standar universal digunakan oleh semua organisasi saat membuat laporan sesuai *GRI Standards*. Organisasi menggunakan standar sektor sesuai dengan sektor dimana organisasi tersebut beroperasi dan standar topik sesuai daftar topik material yang organisasi gunakan. Adapun penjelasan rinciannya adalah sebagai berikut:

³ <https://majalahcsr.id/gri-keluarkan-standard-terbaru-untuk-pedoman-laporan-keberlanjutan/>, diakses 02 September 2022.

1. Standar Universal: *GRI 1*, *GRI 2*, dan *GRI 3*

a. *GRI 1: Foundation 2021*

GRI 1 memperkenalkan tujuan dan sistem *GRI Standards* serta menjelaskan konsep utama pelaporan keberlanjutan. Bagian ini juga menentukan persyaratan dan prinsip pelaporan yang harus dipatuhi organisasi untuk melaporkan sesuai dengan *GRI Standards*.

b. *GRI 2: General Disclosure 2021*

GRI 2 ini berisi pengungkapan yang digunakan organisasi untuk memberikan informasi tentang praktik pelaporannya dan detail lain dari organisasi, seperti tata kelola, aktivitas dan kebijakannya. Informasi ini memberikan wawasan tentang profil dan skala organisasi serta menjelaskan konteks untuk memahami dampak organisasi.

c. *GRI 3: Material Topics 2021*

Memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara menentukan topik material. *GRI 3* juga berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk melaporkan informasi mengenai proses dalam penentuan topik material, daftar topik material dan cara mengelola setiap topik material.

2. Standar Sektor

Standar sektor memberikan informasi bagi organisasi mengenai kemungkinan topik material. Organisasi menggunakan standar sektor yang berlaku untuk sektornya saat menentukan topik materialnya, dan saat menentukan informasi apa saja yang akan dilaporkan untuk topik material.

3. Standar Topik

Berisi pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampak dalam kaitannya dengan topik tertentu. Standar topik mencangkum beberapa topik, organisasi akan menggunakan standar topik sesuai dengan daftar topik material yang telah ditentukan menggunakan *GRI 3*.

Standar universal yang ditawarkan dalam revisi terbaru yaitu lebih lengkap dan terdapat perubahan penulisan kode. Jika sebelumnya Universal Standards dituliskan dengan kode 101 sampai dengan 103, maka dalam versi terbaru lebih sederhana dengan kode *GRI 1,2* dan *3*. Selain itu, hal baru lainnya adalah terdapat penambahan standar sektor terutama yang menyangkut dengan entitas perusahaan dalam sektor energi dan pertambangan. Kualitas, kelengkapan dan konsistensi pelaporan berbagai sektor organisasi perusahaan yang kian menjadi perhatian dan menjadi penambahan dalam standar. Akan terdapat 31 topik material yang akan dijadikan pelaporan dalam standar sektor *GRI*. Hal tersebut tentunya akan memudahkan entitas dalam menganalisis material keberlanjutannya melalui *GRI Standards*.

GRI Standard 2020 sebagai standar yang masih berlaku sebelum pemberlakuan standar yang terbaru, mencakup dua bagian, Standar Universal dan Standar Topik-Spesifik. Standar universal terdiri dari tiga seri, *GRI 101: Foundation* tentang titik awal dalam menggunakan *GRI Standards*, *GRI 102: General Disclosure* untuk melaporkan informasi kontekstual mengenai organisasi serta praktik pelaporan keberlanjutannya dan *GRI 103: Management Approach* untuk melaporkan pendekatan manajemen dalam mengelola setiap topik material. Sedangkan standar topik-spesifik bertujuan untuk melaporkan pengungkapan

husus untuk setiap topik material terbagi menjadi tiga seri, *GRI 200*: untuk topik kinerja ekonomi, *GRI 300* topik kinerja lingkungan dan *GRI 400* untuk topik sosial.

Standar topik-spesifik untuk pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan terdapat pada *GRI* seri 300 terkait *environmental performance* yang terbagi atas delapan standar spesifik, di antaranya adalah: (1) *GRI 301: Materials* (Material); (2) *GRI 302: Energy* (Energi); (3) *GRI 303: Water and Effluents* (Air dan Fluen); (4) *GRI 304: Biodiversity* (Keanekaragaman Hayati); (5) *GRI 305: Emissions* (Emisi); (6) *GRI 306: Waste* (Limbah); (7) *GRI 307: Environmental Compliance* (Kepatuhan Lingkungan) dan (8) *GRI 308: Supplier Environmental Assessment* (Penilaian Lingkungan Pemasok) .

Fokus analisis pengungkapan emisi GRK dalam penelitian ini adalah Standar Universal khususnya *GRI 103: Management Approach* dan *GRI Standard* topik spesifik seri 300 khususnya bagian *GRI 305* terkait Emisi. Pengungkapan pendekatan manajemen adalah penjelasan naratif tentang cara suatu organisasi mengelola suatu topik material, dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Organisasi apa pun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan *GRI Standards* diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Oleh karena itu, Standar topik spesifik ini dirancang untuk digunakan bersama dengan *GRI 103: Pendekatan Manajemen* untuk memberikan pengungkapan penuh dari dampak organisasi. *GRI 103* menjelaskan cara melaporkan pendekatan manajemen dan informasi apa yang diberikan.

2.10 Kinerja Keuangan

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Menurut Munawir (2002), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Selain itu, definisi profitabilitas menurut Brigham & Houston (2006) adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur dan menentukan sejauh mana kualitas perusahaan dan prestasi kerja yang dicapai perusahaan. Pada dasarnya kinerja pengukuran kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu *ROA (Return on Asset)*, *ROE (Return on Equity)*, *ROI (Return on Investment)*. Alat ukur profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ROA*, dikarenakan mampu menggambarkan karakteristik dan juga mampu menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan (Prado-Lorenzo *et al.*, 2009).

ROA adalah rasio antara saldo laba bersih setelah pajak terhadap jumlah aset perusahaan secara keseluruhan. *ROA* dapat menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan, *ROA* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas yang dipergunakan. Besarnya perhitungan pengembalian atas aset menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa yang dengan seluruh aset dimilikinya.

Nilai standar *ROA* yang dapat dikategorikan baik ketika nilainya di atas atau lebih dari 5.98%, sebaliknya jika nilai *ROA* berada di bawah 5.98%, berarti berindikasi nilai *ROA* tidak baik. Profitabilitas menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang dapat memberikan pengaruh seberapa cepat dalam bertindak dengan baik atas tekanan eksternal melalui pengungkapan lingkungan (Jannah & Muid, 2014).